

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas beragama Islam terus mengembangkan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah dimulai sejak didirikannya Serikat Dagang Indonesia (SDI) pada tahun 1905. Sejarah perkembangan perbankan syariah diawali dengan beroperasinya Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang berbentuk *Baaitul Tamwil* pada tanggal 4 Juli 1984. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya perkembangan perbankan syariah juga diawali dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi secara syariah, yaitu BPR Berkah Amal Sejahtera pada tahun 1988.¹

Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia dimulai pada saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 tentang “Bunga Bank dan Perbankan”. Hasil lokakarya tersebut adalah rekomendasi pembentukan bank untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sebagai tindak lanjut dari hasil lokakarya MUI dibentuk ide untuk mendirikan bank syariah. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya

¹ Darsono (et.al.). *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016, hal. xv.

berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.²

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sampai sekarang terus mengalami peningkatan. Data dari OJK menunjukkan tahun 2017 total aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp 992,80 triliun dengan industri perbankan syariah mencapai Rp 375,75 triliun, pasar modal syariah sebesar Rp 522,42 triliun dan IKNB Syariah Rp 94,63 triliun.³

Tabel 1. 1 Aset Industri Keuangan Syariah Indonesia (dalam triliun)

Jenis Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Perbankan Syariah	248.11	278.92	304.00	365.03	375.75
Asuransi Syariah	16.66	22.36	26.52	33.24	36.28
Pembiayaan Syariah	24.64	31.67	22.35	35.74	37.99
Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah Lainnya	8.25	12.25	16.03	19.69	20.36
Sukuk Korporasi	7.55	7.12	9.90	11.88	14.31
Reksa Dana Syariah	9.43	11.16	11.02	14.91	18.08
Sukuk Negara	169.29	208.40	296.07	411.37	490.03

Sumber: ojk.go.id, 2017

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan aset industri keuangan syariah pada setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat semakin percaya akan keberadaan lembaga keuangan syariah, terutama pada sektor perbankan syariah. Namun peningkatan aset keuangan syariah tersebut ternyata tidak sebanding dengan pemahaman masyarakat akan produk dan jasa keuangan syariah. Hasil terakhir dari Survey Nasional Literasi dan Keuangan OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks

² *Ibid*

³ <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Tingkatkan-Penetrasi-Sektor-Jasa-Kuangan-Syariah,-OJK-Gelar-Kuangan-Syariah-Fair-di-Cirebon.aspx>. Diakses pada 20 November 2017 pukul 11.00 WIB.

literasi keuangan syariah pada masyarakat Indonesia sebesar 8.1%.⁴ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, artinya hanya ada 8 dari 100 orang yang paham akan produk dan layanan keuangan syariah.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 3 di dunia harus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global di era MEA. Cara dalam menyikapi keuangan adalah dengan mengontrol pengeluaran keuangan individunya. Seseorang yang tidak bisa mengendalikan keuangannya akan berakibat pada pengeluaran keuangan yang tidak terbatas jumlahnya, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang memiliki tingkat literasi keuangan yang kurang baik.⁵

Literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang untuk mengambil keputusan dalam setiap pengelolaan keuangan guna untuk mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi seseorang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya dari rendahnya pendapatan saja, bisa jadi akibat dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*). Mempunyai literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Adanya literasi keuangan yang baik dan pengelolaan keuangan yang tepat, maka taraf kehidupan diharapkan dapat meningkat. Hal tersebut berlaku untuk semua tingkat pendapatan, karena

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (perh). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2017, hal. 51.

⁵ Amanita Novi Yushita, Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi, *Jurnal Nominal*/ Volume VI Nomor 1/ Tahun 2017, hal. 12.

sebesar apapun tingkat pendapatan yang diperoleh tanpa adanya pengelolaan keuangan yang tepat tidak kesejahteraan tidak akan tercapai.⁶

Tabel 1. 2 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Tahun 2016

Industri	Literasi Keuangan Syariah	Inklusi Keuangan Syariah
Perbankan	6.6%	9.6%
Perasuransian	2.5%	1.9%
Pegadaian	1.6%	0.7%
Lembaga Pembiayaan	0.2%	0.2%
Pasar Modal	0.0%	0.0%

Sumber: ojk.go.id, 2017

Melihat hasil survey dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 yang mengindikasikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih rendah, maka diperlukan strategi dari setiap pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah agar produk-produk dan layanan jasa keuangan syariah semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Strategi khusus seperti kegiatan edukasi dan sosialisasi masih menjadi tugas bagi industri jasa keuangan syariah agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya tentang keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan berusaha meningkatkan literasi keuangan melalui program *blue print* Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNLKI) yang diluncurkan pada tahun 2013. Tujuan dari strategi ini untuk meningkatkan indeks literasi keuangan yang tinggi (*well literate*) pada masyarakat. Sasaran pelaksanaan strategi SNLKI ini adalah ibu rumah

⁶ Anastasia Sri Mendari & Suramaya Suci Kewal., Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE MUSI. *Jurnal Economia*. Volume 9, Nomor 2, Oktober 2013, hal. 131.

tangga, UMKM, pelajar, mahasiswa, profesi, karyawan, dan para pensiunan.⁷ Namun seiring dengan perkembangan konsep literasi keuangan di berbagai negara, maka konsep literasi keuangan di Indonesia melakukan penyempurnaan yaitu dengan diterbitkannya Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit 2017*) oleh Otoritas Jasa Keuangan pada November 2017. Selain itu, hasil survey OJK tahun 2016 tentang indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia yang belum mencapai target, menjadi pertimbangan lain dalam merevisi SNLKI.⁸

Selain meluncurkan program SNLKI pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Penyelenggaraan edukasi tersebut wajib dilaksanakan oleh PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) kepada konsumen atau masyarakat sebagai program tahunan. Pelaksana kegiatan adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang diawasi dan terdaftar oleh OJK, baik pelaku usaha konvensional maupun syariah yang terdiri dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Manajer Investasi, Perantara Pedagang

⁷ Sri Lestari, Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan. *Jurnal Fokus Bisnis*, Volume 14, No 02, bulan Desember 2015

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (perh). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2017, hal. 1.

Efek, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Pegadaian.⁹

Tabel 1. 3 Jumlah Bank Syariah di Indonesia

Jenis Industri	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	11	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163	166	167

Sumber: ojk.go.id, 2017

Tabel di atas menunjukkan jumlah Bank Syariah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2013-2017. Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah Bank Umum Syariah, yaitu pada tahun 2013 terdapat 11 unit bank dan tahun 2017 meningkat menjadi 13 unit. Sedangkan pada Unit Usaha Syariah terjadi penurunan jumlah usaha. Pada tahun 2013 jumlah UUS 23 unit dan tahun 2017 turun menjadi 21 unit. Untuk BPRS terjadi peningkatan jumlah bank, tercatat bahwa tahun 2013 terdapat 163 unit dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 167 unit.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah

⁹ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-di-Sektor-Jasa-KuanganBagiKonsumendanataumasyarakat/SAL%20%20POJK%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Kuangan%20-.pdf>, diakses pada 20 November 2017 pukul 11.13 WIB.

atau Koperasi.¹⁰ Di kota Yogyakarta kehadiran BPRS disambut baik oleh masyarakat. Menurut OJK Yogyakarta, saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan produk dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nasabah lebih memilih melakukan pembiayaan di BPRS dari pada kredit melalui BPR konvensional.¹¹

BPRS Madina Mandiri Sejahtera atau Bank Madina Syariah adalah salah satu Bank Syariah di Yogyakarta yang terletak di Jalan Parangtritis KM 3.5 No. 184 Sewon Bantul. Peneliti memilih objek di BPRS Madina Mandiri Sejahtera karena memiliki perkembangan yang baik, terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah dan perkembangan aset pada tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah nasabah pada BPRS Madina merupakan salah satu dampak positif setelah diadakannya program edukasi literasi keuangan syariah.

Tabel 1. 4 Perkembangan Aset BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Tahun	Jumlah Aset
2013	25.577.656.000
2014	32.241.060.000
2015	41.438.118.000
2016	52.466.508.000
2017	70.410.744.000

Sumber: bankmadinasyariah.com, 2017

¹⁰ Darsono (et.al.), *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia. 2016, hal. 269.

¹¹ <https://ekbis.sindonews.com/read/1176771/178/masyarakat-yogyakarta-cenderung-pilih-bprs-ketimbang-konvensional-1486118796> diakses pada 26 Februari 2018 pukul 12.00 WIB.

Tabel 1. 5 Daftar Jumlah Pembiayaan dan Tabungan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Periode 2013-2017

Tahun	Pembiayaan		Tabungan	
	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah
2013	6.899.337.204	233	4.492.139.323	1.814
2014	28.417.305.584	249	5.949.681.601	1.816
2015	32.409.787.000	254	4.926.741.643	3.304
2016	41.774.528.982	306	5.642.155.848	3.667
2017	54.863.484.490	336	6.653.694.319	4.191

Sumber: Dokumen pribadi BPRS Madina Mandiri Sejahtera, 2017

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai rendahnya tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat dan adanya peraturan OJK yang mewajibkan PUJK melaksanakan program kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MASYARAKAT (Studi Kasus pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat?
2. Bagaimana analisis implementasi SEOJK Nomor 1/ SEOJK.07/ 2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
3. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat yang telah mendapatkan program edukasi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat.
2. Untuk menganalisis implementasi SE OJK Nomor 1/ SEOJK.07/ 2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
3. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat yang telah mendapatkan program edukasi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat pada penelitian ini memuat dua hal, yaitu manfaat praktis dan teoritis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pengembangan penelitian selanjutnya.
- b. Untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dalam bidang literasi keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) dan memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah.
- b. Bagi pihak lembaga keuangan syariah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan evaluasi dalam usaha meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat